

DAFTAR BACAAN

Buku – Buku

Ahmad, Hamzah, *Kamus Pintar Bahasa Indonesia*, Fajar Mulya, Surabaya, 1996.

Asshiddiqie, Jimly, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016.

_____, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

_____, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006.

_____, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Cetakan kedua, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008.

Atmadja, Dewa Gedhe, *Hukum Konstitusi Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD 1945*, Setara Press, Malang, 2012.

Basah, Sjachran, , *Eksistensi dan Tolak Ukur Badan Peradilan Administrasi Negara*, Alumni, Bandung, 1985.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002.

Diecy, A.V., *Pengantar Studi Hukum Konstitusi*, terjemahan Introduction to the Study of The Law of the Constitution, penerjemah Nurhadi, M.A, Nusamedia, Bandung, 2007.

Firdaus, *Pertanggungjawaban Presiden Dalam Negara Hukum Demokrasi*, Yrama Widya, Bandung, 2007.

- Hadjon, Philipus M, *Pengantar Hukum Administasi Indonesia*, GadjahmadaPress, Yogyakarta, 1994.
- Harahap, M.Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan Dan Penuntutan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.
- Huda, Ni;matul, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, UII, Press, Yogyakarta, 2003.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Buku I, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2004.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Hukum Masyarakat dan Pembangunan Hukum Nasional*, Bina Cipta, Bandung, 1975.
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), *Panduan Penanganan Konflik Kepentingan Bagi Penyelenggara Negara*, KPK : Jakarta, 2009.
- Mahfud, Moh.MD, *Peradilan Adminstrasi dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2001.
- _____, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, LP3ES, Jakarta, 2007.
- _____, *Konstitusi dan Hukum dalam Kontroversi Isu*, Rajawali Pers, Jakarata, 2010.
- _____, *Politik Ketatanegaraan Indonesia*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press, Yogyakarta, 2003.
- Manan, Bagir dan Kuntana Magnar, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Edisi Revisi, Alumni, Bandung, 1997.

_____, *Sistem Dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*, LPPM Unisba, Bandung, 1985.

Mariana, Paskalina C dan Yuningsih, *Perbandingan Pemerintahan*, Universitas Terbuka, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.

Mulyadi, Lilik, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Jakarta, 2007.

Nasution, Mirza, *Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia*, Sofmedia, Jakarta 2011.

OECD (Economic Co-operation and Development), *Managing Conflict of Interest in the Public Sector : A Toolkit*. OECD Publishing, Paris, 2005

Prins WF dan R. Kosim Adisapoetra, *Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983

Riyanto, Astim, *Teori Konstitusi*, Yapemdo, Bandung, 2003.

Rato, Dominiskus, *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, PT Presindo, Yogyakarta, 2010

Sidharta, Arif, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum*, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Jakarta, 2004

Soehardjo, *Hukum Administrasi Negara pokok-Pokok Pengertian Serta Perkembanganny di Indonesia*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991

Soemantri, Sri, *Prosedur dan Sistem perubahan Konstitusi*, cetakan ke 1 edisi kedua, Alumni,Bandung, Bandung, 2006

Syahrani, Ridwan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999

Apeldorn, Van, *Pengantar Ilmu Hukum*, cetakan kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990,

Zoelya, Hamdan, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 16/PUU-XVI/2018
Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang
MPR, DPR, DPD, DPRD.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 76/PUU-XII/2014
Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang
MPR, DPR, DPD, DPRD.

Website

Akhmad Kholil Irfan, “*Negara Hukum dan Prinsip Equality Before The Law*”,
<http://www.boyyendratamin.com/2015/07/negarahukum-dan-prinsip-equality.html>, diakses pada tanggal 27 Januari 2019

Tirto, “Anggota DPR Herman Herry Diadukan ke Polisi Atas Tuduhan Pemukulan”
<https://amp.tirto.id/anggota-dpr-herman-hery-diadukan-ke-polisi-atas-tuduhan-pemukulan-cMFi> diakses pada 15 Agustus 2018 pada pukul 18.20

AntiKorupsi, “Anggota DPR Diduga Terlibat Korupsi”
<https://antikorupsi.org/id/news/63-anggota-dpr-diduga-terlibat-korupsi> diakses pada 15 Agustus 2018 pada pukul 17.23

CNN, “Nazaruddin Divonis Akibat Kasus Pencucian Uang”,
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20160615195824-12-138428/nazaruddin-divonis-enam-tahun-kasus-pencucian-uang> diakses pada 15 Agustus 2018 pada pukul 18.10

Detik, “ Daftar Anggota DPR RI yang Diduga Terlibat Korupsi”,
<https://news.detik.com/berita/299313/daftar-38-anggota-dpr-ri-yang-diduga-terlibat-korupsi> diakses pada 15 Agustus 2018 pada pukul 18.00